

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Telaah Perekonomian Nasional Tahun 2023-2025

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45% (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13%.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (c-to-c) sebesar 6,94%; 6,37%; dan 5,43%. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96% (c-to-c).

Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat.

Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup: perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari *emerging markets* ke negara maju. Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat.

Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional.

Prospek perekonomian domestik pada 2024-2025 tetap terjaga di tengah semakin tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tahun 2024 akan tetap stabil. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025. Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp 71.584 Triliun, dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp 85.044 Triliun. Transaksi *e-commerce* juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp 487 Triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp 503 Triliun pada 2025.

Tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan antara lain: dinamika perekonomian global yang masih belum stabil, disrupsi energi, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, pengetatan pasokan energi global, serta El Nino yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan di kisaran 5% adalah konsumsi masyarakat yang masih kuat.

Enam agenda nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:

1. Melanjutkan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi;
2. Digitalisasi untuk membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien, transparan, dan membantu pemerintah untuk mengurangi korupsi;
3. Menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang terampil;
4. Mengembangkan infrastruktur untuk membuat interkoneksi dari orang, barang, dan informasi;
5. Melakukan dekarbonisasi untuk mempercepat *net zero emission*, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau;
6. Menyeimbangkan semuanya dengan 'adil' menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia.

3.1.2 Telaah Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2023-2025

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98%, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50% dan pada tahun 2025 pada kisaran 4,90 - 5,60%. Sedangkan inflasi tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah.

Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44-4,94%. Dan tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,28-8,08% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,20-4,60%. Sedangkan PDRB perkapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/tahun pada tahun 2024 dan 47,60 juta rupiah/ tahun pada tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di tahun 2024 dan turun menjadi 0,362 pada tahun 2025.

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2025

Dinamika perekonomian Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh geliat perekonomian Nasional dan Jawa Tengah. Ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2023 sebesar 5,23% setelah pada tahun 2022 tumbuh membaik dari 3,75% pada tahun 2021 menjadi 5,76% bangkit dari keterpurukan pandemi Covid 19. Turunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 antara lain disebabkan oleh perlambatan perekonomian global dan fenomena El Nino yang berkepanjangan. El Nino menyebabkan lapangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai salah satu sektor dominan di Kabupaten Sragen melambat.

PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 sebesar Rp 30.442.192,81 juta, naik dari Rp 28.929.808,57 juta pada tahun 2022. Tiga Lapangan Usaha penyumbang terbesar PDRB adalah: Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar Rp 11 027 728,73 juta; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 6 126 484,86 juta; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp 3 903 737,40 juta.

Sedangkan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2023 sebesar Rp 48 570 127,58 juta meningkat dari Rp 44.242.876,01 juta pada tahun 2022, dengan 3 lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar adalah: Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar Rp 19 223 342,26 juta; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 8 626 700,01 juta; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6 602 286,59 juta.

PDRB dari sisi Pengeluaran Kabupaten Sragen Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan tumbuh cukup signifikan dari Rp 27.355.145,96 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 28.929.808,57 juta. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan dukungan paling tinggi yaitu sebesar Rp 19.728.500,82 juta, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mendukung sebesar Rp 6.561.737,11 juta, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mendukung sebesar Rp 1.440.876,20 juta. PDRB dari sisi Pengeluaran Kabupaten Sragen Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh dari Rp 40.087.775,48 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 44.280.477,06 juta. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan dukungan paling tinggi yaitu sebesar Rp 30.243.125,58 juta, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mendukung sebesar Rp 10.284.491,25 juta, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mendukung sebesar Rp 2.414.553,99 juta.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mampu mendorong secara positif terhadap mesin investasi. Upaya untuk mendorong produksi nasional yang berdaya saing, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta kebijakan nasional penurunan impor, diharapkan dapat memperbaiki kinerja perekonomian nasional, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian di daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui DAU Tambahan untuk Kelurahan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif dalam mendorong perekonomian daerah.

Kerangka perekonomian daerah Kabupaten Sragen yang meliputi indikator ekonomi makro daerah tahun 2023-2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2023-2025

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024*)	Target Tahun 2025*)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,5	5,86
2.	Inflasi Tahun Kalender (%) *)	3,20	3,5±1	3,5±1
3.	PDRB ADHB (Juta Rp)**)	48.570.127,58	51.253.601,77	62.605.727,35
4.	PDRB ADHK (Juta Rp)**)	30.442.192,81	32.116.513,41	34.121.843,24
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,87	3,57	3,55-3,17
6.	Angka Kemiskinan (%)	12,87	12,32	12,07-11,65
7.	IPM	75,10	75,21	76

Sumber Data: BPS-Bapperida, 2024

*)Target Perubahan RKPD 2024

**) Proyeksi

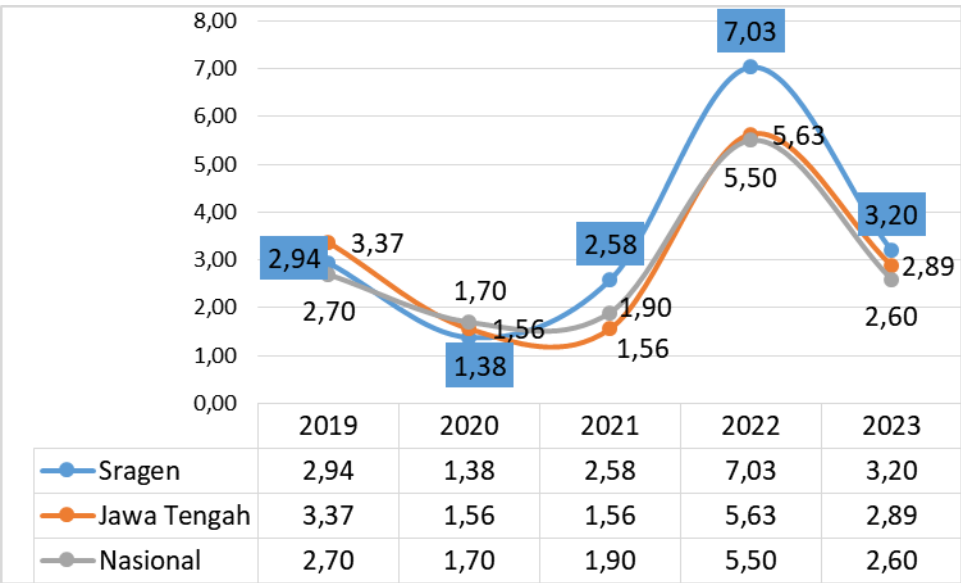
Pertumbuhan ekonomi. Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global, perekonomian daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 diharapkan meningkat dengan prediksi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Solo Raya serta ditingkatkannya dukungan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor. Meningkatnya pelayanan publik yang dibangun di Kabupaten Sragen hingga tahun terakhir pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan

iklim investasi dan perekonomian masyarakat secara luas, pelan tapi pasti, dapat menjaga keberdayaan masyarakat dan daerah menuju peningkatan kesejahteraan.

Dukungan kepada UMKM dan industri pengolahan ataupun industri kreatif, serta perdagangan akan sangat berarti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Apalagi dengan rencana strategis nasional melalui penerbitan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2022 berdasarkan data PDRB ADHK didukung secara signifikan oleh 3 lapangan usaha yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Dukungan ketiga sektor dominan ini diasumsikan masih akan berlanjut pada tahun 2023 hingga 2025.

Angka Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sragen dalam periode 2019-2023 dengan menggunakan data inflasi Kota Surakarta bersifat fluktuatif antara 1,38%-7,03%. Inflasi tahunan 2023 sebesar 3,20%, laju inflasi ini berada di atas laju inflasi Jawa Tengah 2,89% dan laju inflasi Nasional 2,60%.



Sumber Data: BPS, 2023

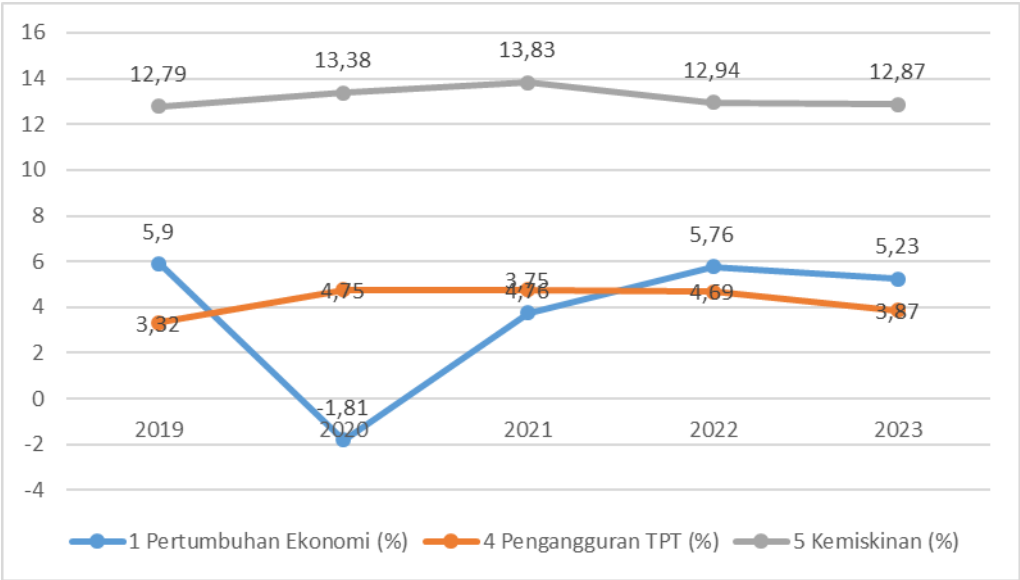
Gambar 3.1
Perkembangan Inflasi Kab.Sragen Tahun 2019-2023 dan Perbandingannya dengan Prov.Jawa Tengah dan Nasional

Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Sragen Desember 2022 sebesar 107,31, meningkat daripada nilai IHK Januari 2022 sebesar 105,32. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga untuk

komoditi-komoditi tertentu yang dikonsumsi masyarakat dalam tahun 2022. Pada September 2023, inflasi gabungan enam kota di Jawa Tengah sebesar 0,41% dengan IHK sebesar 115,59. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami kenaikan inflasi. Penyebab utama inflasi September 2023 adalah kenaikan harga komoditas beras, bensin, angkutan udara, biaya pulsa ponsel, dan gula pasir. Penahan utama inflasi adalah penurunan harga komoditas telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender September 2023 sebesar 1,99% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) sebesar 2,49%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data realisasi TPT tahun 2021 sebesar 4,76%, dapat diturunkan menjadi sebesar 4,69% pada 2022 dan 3,87% pada 2023. Penurunan TPT Kabupaten Sragen dari tahun 2022 ke 2023 cukup signifikan, yaitu sebesar 0,82%. Dengan rencana kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ke 2025 sebesar 0,63% diharapkan mampu mengurangi TPT sebesar 0,32% dalam tahun 2023-2025 melalui peningkatan peluang kerja dan pemberdayaan UMKM.

Kemiskinan menjadi isu nasional dan regional yang memerlukan komitmen Pemerintah Daerah dalam penanganannya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen masih sangat tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dari aspek kinerja penurunan angka kemiskinan, persentase penduduk miskin kabupaten Sragen menurun dari 13,83% pada Maret 2021 menjadi 12,94% pada Maret 2022, dan 12,87% pada Maret 2023. Dengan kenaikan target Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2023 ke 2025 sebesar 0,63% diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,8% dalam tahun 2023-2025 melalui pendekatan sosial, ekonomi dan kultural.



Gambar 3.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Dari grafik terlihat bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen dibarengi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan penurunan Angka Kemiskinan, sehingga angka Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 perlu dinaikkan targetnya menjadi 5,86% dengan pertimbangan yang logis sesuai dengan potensi daerah untuk dapat mendorong penurunan TPT menjadi 3,55% dan Angka Kemiskinan menjadi 12,07%.

Arah kebijakan dalam pencapaian indikator ekonomi makro daerah tahun 2025 adalah:

1. Memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pertumbuhan 3 (tiga) lapangan usaha dominan penyumbang PDRB ADHK yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ketiga sektor dominan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2024 dan 2025 melalui pengembangan sumber ekonomi baru Poltekpar di Gemolong serta pembangunan titik-titik industri menengah dan besar sebagai manivestasi peningkatan investasi nyata di daerah, dengan asumsi bahwa masa pandemi berubah status menjadi endemi dan semakin kondusif untuk pergerakan masyarakat.
2. Mendorong pemberdayaan UMKM dan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Rencana strategis nasional untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan keunggulan kompetitif angkatan kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa di Kabupaten Sragen tahun 2024 dan 2025.
5. Memantapkan perwujudan *smart city* yang telah mulai dibangun dalam tahun anggaran 2019 dan 2020. Dengan terwujudnya *smart city* diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian daerah secara luas, pelan tapi pasti, dapat semakin meningkatkan keberdayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
6. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menekan laju inflasi dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan target 2024 guna mengendalikan tingkat harga yang tidak terlalu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dengan mendorong jumlah dan kualitas produk

lokal serta meningkatkan penggunaan bahan baku dari dalam negeri dan mengurangi penggunaan bahan impor.

7. Penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Strategi ini juga merupakan dukungan kepada kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dari Pemerintah dan Provinsi Jawa Tengah. PKE Kabupaten Sragen pada tahun 2023, 2024 dan 2025 merupakan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis desa sebagai kelanjutan dari PKE tahun 2022, melalui: 1) bantuan pembangunan RTLH; 2) pemberian bantuan jaminan hidup (jadup), serta 3) bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
8. Dukungan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara umum dengan:
 - a. Tetap mengoptimalkan data survey Pemerintah Daerah terhadap rumah tangga miskin yang mengajukan usulan bantuan dalam rangka mengurangi kesenjangan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang masih banyak salah sasaran, yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pusat ke rumah tangga miskin tidak tepat sasaran.
 - b. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin.
 - c. Mengoptimalkan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta DAU Tambahan untuk Kelurahan dan Dana Pendampingnya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam hal peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perkembangan dan peningkatan taraf hidup.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, berasal dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah.

Secara umum perkembangan kondisi penerimaan Pajak pascapandemi semakin membaik, mampu meningkat sangat signifikan pada realisasi tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, potensi penerimaan pajak optimis meningkat baik dari potensi pungutan maupun dari adanya kenaikan kewajiban PBB. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, PBB dan Pajak Restoran.

Pada tahun 2025, salah satu pengaturan Pajak Daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah sinergitas pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Opsen. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, yang dikenakan atas Pajak terutang dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang

dikenakan Opsen. Dalam hal ini, Kabupaten/Kota menerima Bagi Hasil langsung Pajak yang dikenakan Opsen tersebut, sehingga penerimaan Pajak pada tahun 2025 jauh meningkat secara sangat signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya, yang pada sisi lain terdapat penurunan penerimaan dari bagi Hasil Pajak pada Penerimaan Dana Transfer Antar Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2025 optimis dapat ditingkatkan dari tahun 2023 berdasarkan kondisi daerah yang semakin bangkit dan kondusif pascapandemi Covid 19. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha. Berdasarkan UU tentang HKPD tahun 2023, Penerimaan BLUD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah bergeser dari Lain-lain PAD yang Sah ke penerimaan Retribusi, sehingga rencana penerimaan Retribusi tahun 2025 meningkat sangat signifikan. Pada sisi lain, Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah menurun sangat signifikan pula.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 diasumsikan sama dengan tahun 2024. Peningkatan dari pos bagian laba atas penyertaan modal BUMD.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 menurun sangat signifikan dengan bergesernya BLUD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang semakin membaik sampai dengan tahun 2022 serta adanya rencana kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, diharapkan makin meningkatkan penerimaan pendapatan transfer. Penerimaan Dana Transfer Pusat tahun 2025 diasumsikan sesuai dengan alokasi TKD Tahun 2024 non Dana Insentif Fiskal. Pendapatan Daerah dari Dana Transfer Pusat sebesar Rp 1.906.057.265.000,00. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditargetkan berdasarkan pertimbangan realisasi pemanfaatan pada tahun 2023. Khusus untuk Bantuan Keuangan Provinsi dimasukkan alokasi untuk kegiatan TMMD.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan Pendapatan Hibah *reimburs* dari Pemerintah Pusat, untuk tahun 2025 tidak dialokasikan dengan pertimbangan tidak adanya penerimaan dana *reimburs* sejak Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama tahun 2021-2023, Dana Transfer memiliki proporsi yang dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 82,1%, diikuti PAD sebesar 16,5% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,4%. Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk pembangunan diharapkan dapat meningkat signifikan pada tahun 2025.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH (Rp)				
		R 2021	R 2022	R 2023	2024*)	2025**)
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	537.265.408.211	364.484.878.491	406.014.146.980	394.454.933.052	511.319.957.579
01.01.01	Hasil Pajak Daerah	107.148.796.972	118.341.014.121	143.361.322.953	120.000.000.000	219.000.000.000
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	13.583.333.151	19.009.471.890	19.643.284.210	25.315.605.425	260.464.596.450
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.249.581.299	24.773.847.305	28.654.523.837	25.270.331.999	25.270.331.999
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	394.283.696.789	202.360.545.175	214.355.015.980	223.868.995.628	6.585.029.130
01.02	DANA TRANSFER	1.710.748.439.505	1.807.631.293.551	1.893.193.353.499	1.907.853.213.000	1.862.939.045.120
01.02.01	DANA TRANSFER PUSAT	1.527.768.793.026	1.607.320.298.551	1.688.823.352.255	1.731.703.213.000	1.765.289.045.120
01.02.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	38.765.724.777	35.689.395.438	34.678.320.216	26.320.304.000	26.320.304.000
01.02.01.02	Dana Alokasi Umum	984.484.500.000	979.305.029.339	1.031.504.587.630	1.071.083.438.000	1.071.083.438.000
01.02.01.03	Dana Alokasi Khusus	301.079.257.249	395.222.762.774	385.924.944.409	407.339.048.000	457.290.828.120
01.02.01.04	Dana Insentif Daerah/Fiskal	28.073.662.000	14.431.466.000	23.002.021.000	16.365.948.000	0
01.02.01.05	Dana Desa	175.365.649.000	182.671.645.000	213.713.479.000	210.594.475.000	210.594.475.000
01.02.02	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	182.979.646.479	200.310.995.000	204.370.001.244	176.150.000.000	97.650.000.000
01.02.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	174.684.467.479	184.776.461.000	189.747.812.244	176.150.000.000	97.650.000.000
01.02.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.295.179.000	15.534.534.000	14.622.189.000	0	0
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.707.880.000	5.723.900.000	4.238.000.000	0	0
01.03.01	Pendapatan Hibah	88.707.880.000	5.723.900.000	4.238.000.000	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.336.721.727.716	2.177.840.072.042	2.303.445.500.479	2.302.308.146.052	2.374.259.002.699

Sumber: BPKPD, SIPD 2025

Keterangan: *) APBD 2024

**) Rencana

Dalam rencana kemampuan anggaran tahun 2025, besaran transfer pusat diasumsikan sesuai dengan data terakhir penerimaan daerah tahun 2024 berdasarkan Surat Dirjen PK Nomor: S-128/PK/2-23 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024. Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah yang meliputi: Bidang Pendidikan sebesar Rp 36.264.790.000,00; Bidang Kesehatan sebesar Rp 22.318.616.000,00; Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 13.002.528.000,00; DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp 2.400.000.000,00; dan Gaji P3K Formulasi sebesar Rp 21.384.342.000,00.

Tabel 3.3
Realisasi Prosentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	TAHUN				
		R 2021	R 2022	R 2023	2024*)	2025**)
01.01	Pendapatan Asli Daerah (%)	22,99	16,74	17,63	17,13	21,54
01.02	DanaTransfer (%)	73,21	83,00	82,19	82,87	78,46
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	3,80	0,26	0,18	0,00	0,00
	Jumlah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPD Kabupaten Sragen, 2024

Keterangan: *)Target APBD

**) Rencana

Tingkat kemandirian fiskal masih rendah, karena pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Selama tahun 2021-2023, Dana Transfer memiliki proporsi yang dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 79,47%, diikuti PAD sebesar 19,12% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,41%. Kontributor terbesar PAD tahun 2021-2023 adalah Lain-lain PAD yang Sah yang di dalamnya meliputi penerimaan BLUD yang sangat dominan, diikuti kontribusi dari Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi daerah.

Pada rencana tahun 2025, PAD sebagai cerminan kemandirian keuangan direncanakan berkontribusi sebesar 21,54% terhadap Pendapatan Daerah, dengan rasio terhadap total Dana Transfer sebesar 27,45%. Ketergantungan Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi yaitu sebesar 78,46%.

Semakin meningkat kebutuhan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, dipastikan tidak dapat tercukupi anggarannya dari Pendapatan Daerah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan pembangunan daerah tetap dilaksanakan dengan melalui mekanisme pengusulan penganggaran kepada Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN), baik berupa anggaran dari APBN sektoral Kementerian/Lembaga, Tugas Pembantuan (TP), Dana Insentif Fiskal/DIF (dari jalur prestasi daerah), maupun anggaran bantuan/hibah Pemerintah lainnya.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pemberlakuan pajak restoran 10%; menaikkan tarif reklame sebesar 100%; serta menaikkan tarif air tanah sesuai dengan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Melalui Perda Nomor 9 Tahun 2023, dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi. Sinergitas tersebut berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya yang diarahkan untuk:

1. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
2. penanganan piutang pajak dan retribusi;
3. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
4. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
5. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
6. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
7. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
8. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
9. pelaksanaan kerja sama teknis;
10. pertukaran data dan informasi; dan
11. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen BBNKB;
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) dan Opsen Pajak MLB.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan prediksi SiLPA tahun 2023 yang dapat dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2025, rencana Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 2.530.092.103.378,00 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Nasional sebagai langkah harmonisasi pelaksanaan pembangunan, serta mendorong peningkatan Belanja Daerah yang produktif, efektif dan efisien melalui:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 1.856.502.548.315,00 dengan proporsi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.177.718.892.908,00 Tingginya proporsi ini Belanja Pegawai terkait dengan kenaikan Gaji

dan Tunjangan ASN yang meliputi PNS dan P3K sebesar 8% serta peningkatan jumlah ASN P3K di luar formasi terbaru (Non P3K Formulasi baru). 586.587.783.407

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp 586.587.783.407,00. Belanja Subsidi sebesar Rp 1 Miliar untuk KURDA bagi UMKM tahun ke-3.

Belanja Bunga atas pinjaman daerah sudah selesai pada tahun 2024. Belanja Hibah sebesar Rp 72.41.872.000,00. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 18.774.000.000,00.

- 2. Belanja Modal tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 281.349.014.063,00 untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang dan sarpras penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi Belanja modal berkisar pada 10-20%.
- 3. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri dinaikkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi; kejadian tidak terduga; atau pun dukungan alokasi APBD untuk mendukung program-program dari Pemerintah. Belanja Tak Terduga di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 10 Miliar.
- 4. Belanja Transfer. Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer tahun 2025 meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD-APBN), serta Bantuan Keuangan Khusus untuk stimulan pembangunan desa. Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp 382.240.541.000,00.

Tabel 3.4
Rencana Belanja Daerah Tahun 2025

URAIAN	Realisasi 2023 (Rp)	RENCANA (Rp)	
		2024	2025
BELANJA	2.268.828.709.386	2.415.185.886.886	2.530.092.103.378
BELANJA OPERASI	1.671.033.981.797	1.794.645.132.721	1.856.502.548.315
Belanja Pegawai	989.650.909.979	1.148.608.921.437	1.177.718.892.908
Belanja Barang dan Jasa	563.223.159.554	528.712.043.034	586.587.783.407
Belanja Bunga	2.271.775.621	4.000.000.000	0
Belanja Subsidi	2.499.260.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Belanja Hibah	90.473.076.643	99.358.668.250	72.421.872.000
Belanja Bantuan Sosial	22.915.800.000	12.965.500.000	18.774.000.000
BELANJA MODAL	433.411.157.251,00	227.135.283.165	281.349.014.063
BELANJA TAK TERDUGA	193.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
BELANJA TRANSFER	400.241.729.607	383.405.471.000	382.240.541.000

Sumber: BPKPD dan Bapperida Kab.Sragen, 2024

Rencana Belanja Daerah tahun 2025 meliputi belanja-belanja *earmark* yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu:

- 1. Belanja DAU untuk formasi P3K sebesar Rp 21.384.342.000,00; DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp 36.264.790.000,00; DAU Bidang

Kesehatan sebesar Rp 22.318.616.000,00; dan DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 13.002.528.000,00 dengan pengalokasian berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing.

2. Belanja DAU Kelurahan dari dana *earmark* sebesar Rp 2,4 Miliar, dengan Pendamping DAU Kelurahan yang ditentukan sebesar Dana Desa terendah di Kabupaten Sragen yaitu sebesar Rp 723.900.000,00, sehingga total alokasi belanja DAU untuk 12 Kelurahan di Kabupaten Sragen beserta Dana Pendampingnya sebesar Rp 8.686.800.000,00.
3. Belanja DAK Non Fisik untuk TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD sebesar Rp 158.685.558.000,00.
4. Dana Desa sebesar Rp 210.594.475.000,00.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 3, Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar:

- a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa (promotif dan preventif) melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria: a). bertempat tinggal di wilayah Desa; b). diputuskan melalui Musyawarah Desa; c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; d). diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 dalam bentuk material/bahan bangunan; dan e). Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 10.815.839.000,00.

Belanja Daerah tahun 2025 dari sisi *mandatory spending* dalam setiap tahunnya diarahkan pada pemenuhan:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;
2. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
3. Belanja Pegawai di luar tunjangan guru diarahkan maksimal 30% dari total belanja daerah sampai dengan tahun 2027 dengan menekan belanja untuk honor dan lembur PNS;
4. Belanja Infrastruktur pelayanan publik diarahkan minimal 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau desa sampai dengan tahun 2027;
5. Belanja Diklat ASN dan Belanja Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah;

- 6. Belanja Bantuan untuk Partai Politik dengan besaran disesuaikan dengan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 7. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Pemerintah Desa diarahkan pada upaya pemberdayaan desa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk Bidang kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, proporsi *mandatory spending* yang wajib dialokasikan dari Anggaran Daerah tidak ditentukan prosentasenya.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah tahun 2025 dari sisi Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan rencana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah. Di samping itu, guna mewujudkan prioritas pemabangunan daerah tahun 2025, tetap diupayakan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain sesuai dengan potensi yang ada.

Sedangkan Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 direncanakan nihil.

Secara ringkas, rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2025

URAIAN	Realisasi 2023 (Rp)	RENCANA (Rp)	
		2024	2025
PEMBIAYAAN	445.809.696.889	193.085.678.412	155.833.100.679
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	505.725.522.889	194.585.678.412	155.833.100.679
Penggunaan SiLPA	394.537.252.889	194.585.678.412	155.833.100.679
Pinjaman kepada Pihak ketiga	111.188.270.000	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	59.915.826.000	1.500.000.000	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.850.000.000	1.500.000.000	0
Pembayaran pokok utang	57.065.826.000	0	0

Sumber: BPKPD Kabupaten Sragen, 2024

Rencana pengurangan secara signifikan atas penggunaan SiLPA untuk menutup defisit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka menjaga kontinuitas penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan

kemampuan anggaran daerah tahun 2025 sampai dengan akhir tahun anggaran.

-oOo-